

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN  
PERIODE TAHUN 1985 – 2002**



Disusun Oleh :

**SARDONO SETIARTO**

94213035

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2004

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN  
PERIODE TAHUN 1985 – 2002**

**Disusun Oleh :**

**SARDONO SETIARTO**

**94213035**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
.YOGYAKARTA**

**2004**

**HALAMAN PENGESAHAN .**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN  
PERIODE TAHUN 1985 – 2000**

**Disusun Oleh :**

**SARDONO SETIARTO  
94213035**

**Yogyakarta, ..... Mei 2004  
Skripsi ini telah disetujui oleh  
Dosen Pembimbing**



**Drs. Nur Feriyanto, M.Si.**

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN  
KLATEN TAHUN 1985-2004**

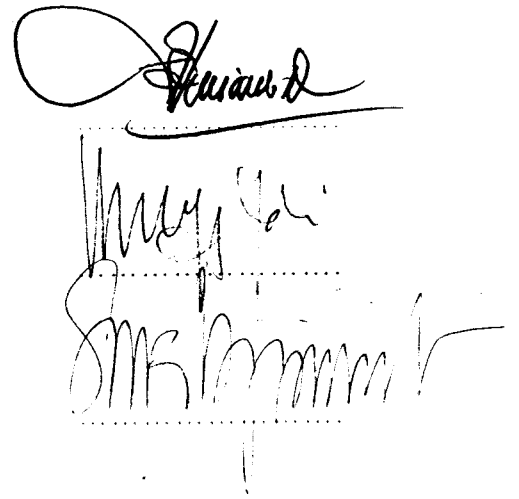
Disusun oleh: **SARDONO SETIARTO**  
Nomor Mahasiswa: **94213035**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS  
pada tanggal 16 Juni 2004


Pembimbing Skripsi : Drs Nur Ferianto, Msi

Penguji I : Drs Unggul Priyadi, Msi

Penguji II : Dra Sarastri MR, Msi



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

  
Drs H Suwarsono, MA

## PERSEMBAHAN

*... Dan kami bersyukur pada Allah  
Yang telah membukakan gerbang tua ini  
... Dan kami bersyukur pada Ayah dan Bunda  
Yang sepanjang malam selalu berdoa  
... Dan kami berhutang pada manusia  
Yang telah menjadi guru-guru kami*

**Kupersembahkan untuk orang-orang tercinta dalam hidupku, Sebagai tanda baktiku**

**Ayah Bunda Binoe Soebroto**

**Saudaraku mas Antok, mbak Rini, mas Ibnu dan mbak Ari**

**Kasihku Enoch**

**Atas doa dan kasih sayang mereka pada ku**

## MOTTO

“ Sahabat sejawatimu adalah orang yang selalu berterus terang kepadamu jika engkau berada dalam kebingungan, Dia pun rela berkorban dan mencurahkan tenaga demi dapat berkumpul denganmu.”

(Ali Bin Abi Thalib .RA)

“ Kegagalan tidak berarti saya telah menyalah-nyaiakan hidup, tetapi saya harus mulai lagi dengan cara lain, dengan lebih giat dan sabar.”

(Dr. Robert H. Schuller)

“ Masa depan harus dipikirkan, direncanakan, dipersiapkan sebaik-baiknya, tapi jangan pernah sekali-kali khawatir akan hari esok.”

( Dale Carnegie)

“ Bila saya berada di antara dua kejahatan, maka saya akan memilih satu yang belum pernah saya coba.”

(Mae West)

“ Allah mengaruniai saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah, ketenteraman untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan.”

(St. Francis dari Assisi)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirraahim*

*Alhamdulillahirobil'aalamin*

Puji dan syukur senantiasa hanya untuk Allah semata, yang selalu melimpahkan daya dan kekuatan, semangat serta harapan, juga segala petunjuk dan karunia-Nya, sehingga dapat diselesaikan skripsi ini yang berjudul :

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 1985-2002”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menempuh ujian dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Sowarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah memberi ijin kepada penulis untuk menempuh tugas akhir.
2. Bapak Drs. Nur Feriyanto, M.Si. yang telah membimbing dengan penuh perhatian dan kesabaran, sehingga kami mampu menyelesaikan skripsi, kepada beliau penulis mengucapkan banyak terima kasih.
3. Seluruh dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak menyumbangkan dasar-dasar disiplin Ilmu Ekonomi Studi. Pembangunan dengan penuh tanggung jawab selama penulis menempuh kuliah.
4. Ayahanda Drs. Binoe Soebroto dan Ibunda tercinta yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan penulis.

5. Kakak-kakakku tercinta, Mas Antok, Mbak Rini, Mas Ibnu, Mbak Ari yang terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta keponakan-keponakanku yang dengan kepolosan jiwanya telah menghibur hari-hari penulis
6. Adinda Enoh Dwi Prihatini yang telah banyak membantu secara moral dan spiritual semoga Allah membalasnya.
7. Teman-teman IESP'94 dan KKN Ekstensi Angkatan25 ( Dinar, Imam, Shinta, Maya, Ika, Agung, Wita, Pipink)
8. Sahabat-sahabatku: Monte, Komang, Mbendol, Darwis, Kancil, Yeyek, Yudek, Ajis, Glintoe, Basole, Amiek juga tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Triwoko beserta keluarga.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, Amien.

Yogyakarta, Juni 2004

Penulis



## ABSTRAKSI

Dalam penelitian ini Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Periode Tahun 1990/1991 – 2000/2001, permasalahan yang dirumuskan untuk diteliti meliputi (1) bagaimanakah pengaruh variabel investasi, jumlah penduduk, pendapatan perkapita masyarakat terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten serta (2) apakah variabel yang paling dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah Kabupaten Klaten dengan kurun waktu tahun 1990 – 2000. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang akan diperoleh melalui instansi terkait yaitu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Klaten, serta dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda mekanis dengan variabel dependen PAD dan variabel independen investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita.

Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa (1) variabel investasi dan pendapatan per kapita secara individual tidak terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten, (2) variabel jumlah penduduk secara individual terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten, (3) secara bersama-sama variabel investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Hipotesis .....	11
G. Metodologi Penelitian.....	12
1. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Definisi Operasional Variabel.....	12
4. Teknik Analisa Data.....	13

BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA .....	20
	A. Pembangunan Daerah .....	20
	1. Pengertian Pembangunan Daerah .....	20
	2. Corak Pembangunan Daerah .....	20
	B. Otonomi Daerah .....	23
	C. Sumber-sumber Pendapatan Daerah .....	25
	1. Menurut UU No 5 Tahun 1974 .....	25
	2. Menurut UU No 25 Tahun 1999 .....	27
	D. Peranan Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi.....	38
	E. Peranan Penduduk dalam Pembangunan Ekonomi .....	42
	F. Pendapatan Per Kapita.....	43
	G. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	45
BAB III.	GAMBARAN UMUM DAERAH DAN OBYEK PENELITIAN	47
	A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Klaten .....	47
	1. Kondisi Demografis .....	47
	2. Ketenagakerjaan .....	50
	3. Perkembangan Perekonomian .....	53
	B. Tinjauan Keuangan Daerah .....	57
	1. Penerimaan Daerah .....	57
	2. Pendapatan Asli Daerah Sendiri .....	59
	3. Pengeluaran Daerah .....	62

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Analisis Deskripsi Variabel .....	64
1. Pendapatan Asli Daerah .....	64
2. Investasi .....	65
3. Jumlah Penduduk .....	66
4. Pendapatan Perkapita .....	67
B. Analisis Data .....	68
1. Uji Statistik .....	69
2. Uji Asumsi Klasik .....	72
3. Koefisien Regresi .....	76
4. Interpretasi Ekonomi .....	76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1999/2000 – 2000/2001 (rupiah) .....	7
Tabel 3.1.	Kepadatan Penduduk Per Desa dan Per m <sup>2</sup> Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2000 .....	47
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2000 .....	49
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2000 .....	50
Tabel 3.4.	Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Klaten dan Kegiatannya .....	51
Tabel 3.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Klaten Tahun 1998-2000 .....	52
Tabel 3.6	Pertumbuhan Ekonomi Agrerat di Kabupaten Klaten Tahun 1995-2000 .....	53
Tabel 3.7.	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Klaten 1995-2000 (Persen) .....	54
Tabel 3.8.	Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995 – 2000 (Persen) .....	55

Tabel 3.9.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita di Kabupaten Klaten Tahun 1995-2000 .....	56
Tabel 3.10	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kelompok Sektor di Kabupaten Klaten Tahun 2000 (Persen) .....	56
Tabel 3.11	Realisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten Klaten berdasarkan Komponen Penggunaannya tahun 1989/1990-1999/2000 (rupiah) .....	58
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Penerimaan dari Pos PAD di Kabupaten Klaten Tahun 1994/1995-2000/2001 (rupiah) .....	60
Tabel 3.13	Anggaran Belanja Daerah kabupaten Klaten tahun Anggaran 1990/1991-2000/2001 (rupiah) .....	62
Tabel 4.1	Realisasi penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1990/1991-2000/2001 ....	64
Tabel 4.2	Perkembangan Investasi Kabupaten Klaten Tahun 1990-2000	66
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 1990-2000 .....	66
Tabel 4.4	Perkembangan Pendapatan Per kapita kabupaten Klaten Tahun 1990-2000 .....	67
Tabel 4.5	Hasil Pengolahan Data Dengan Variabel Terikat PAD .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran .....	9
Gambar 1.2. Percobaan d (Durbin – Watson) .....	18
Gambar 2.1. Penentuan Tingkat Ekuilibrium Dari Output .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula dalam menerima kembali hasil pembangunan.

Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah karena keberhasilan dalam pembangunan daerah akan menunjang pula keberhasilan dalam pembangunan nasional. Di dalam GBHN selalu diamanatkan agar hasil-hasil pembangunan nasional dapat dinikmati secara merata sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Adanya perubahan struktur yang menyangkut pembangunan wilayah suatu daerah, maka daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khususnya yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan di wilayah



masing-masing, sebab sukses dan tidaknya pembangunan semakin tergantung pada sukses dan tidaknya pembangunan di daerah. Keberadaan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, kota yang mampu menyelenggarakan kelancaran dan pemerataan pembangunan mutlak diperlukan. Hubungan antara pusat dan daerah yang sering dibicarakan adalah berkaitan masalah otonomi daerah, khususnya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri. Untuk merealisasikan kegiatan pembangunan yang tesebar di daerah-daerah, dapatlah kita maklumi unsur pembiayaan yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang memadai dan pengolahan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dilakukan, menjadi dasar bagi perumusan kebijakan program-program investasi dan penetapan sasaran-sasaran pembangunan.

Sejalan dengan struktur pemerintahan yang berlaku di tiap daerah di wilayah nasional terdapat tiga komponen pembiayaan pembangunan dari pemerintah yaitu :

1. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-program pembangunan di daerah Propinsi.

2. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah Propinsi yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi untuk pembiayaan program pembangunan daerah Propinsi.
3. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah Kab/ Kota yang dialokasikan melalui APBD Kab/ Kota untuk pembiayaan program-program pembangunan daerah Kab/ Kota.

Masing-masing komponen pembiayaan dari pemerintah tersebut diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditentukan dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi berlangsungnya pembangunan.

Dari pembangunan ekonomi nasional selama pemerintah orba yang lebih terfokus pada pertumbuhan ternyata tidak membuat banyak daerah di tanah air berkembang dengan baik. Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran sebagai hasil daripada pembangunan selama itu lebih terkonsentrasi di pusat (Jawa), pada tingkat nasional laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan per kapita naik terus setiap tahun (sampai krisis terjadi), namun sebaliknya pada tingkat regional. Demikian juga, kesenjangan dalam distribusi pendapatan semakin besar.

Terjadinya ketimpangan ekonomi regional di Indonesia selama pemerintahan orde baru, berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil

sumber daya alam. Akibatnya daerah-daerah tersebut tidak dapat menikmati hasilnya dengan layak, juga bantuan dan pinjaman luar negeri, PMA, dan tata niaga di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah daripada potensi ekonominya.

Konstelasi hubungan keuangan pusat dan daerah menyebabkan relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah (Tulus T.H. Tambunan, 2001 : 200).

Dengan kondisi yang terjadi pada masa pemerintah orde baru, semua kegiatan pemerintahan maupun kegiatan ekonominya semua di tangan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dan ketidakberdayaan ekonomi, muncul sentimen regional dan represi serta pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Dengan kondisi tersebut memicu masyarakat untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas.

Untuk menyikapi tuntutan dari masyarakat tersebut MPR RI menetapkan TAP MPR RI NO. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dari aspek pengaturan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, serta UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai pengganti UU No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pokok undang-undang ini untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Dalam UU No. 25 tahun 1999, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 mendorong daerah untuk berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri, karena selama ini daerah tidak dimungkinkan untuk mandiri, faktor yang menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas dari potensi daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar (Tulus T.H. Tambunan, 2001 : 202).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno PH, 1981 : 187). Dapat dikatakan bahwa PAD merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Sedangkan menurut UU No. 25/1999 Pasal 4, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun anggaran 1999/2000–2000/2001 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penerimaan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.1. :

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1999/2000 – 2000/2001 (rupiah)

No	Jenis Penerimaan	TA 1999/2000	TA 2000/2001
		Realisasi	Realisasi
1	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu	3.432.786.166,49	3.648.659.799
2	Bagian Pendapatan Asli Daerah Sendiri	7.901.972.073,75	6.598.582.386
	a. Pajak Daerah	3.191.855.723	2.134.681.960
	b. Retribusi Daerah	3.294.346.225	2.981.743.940
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	880.500.000	956.000.000
	d. Lain-lain PAD yang Sah	535.270.125,75	526.156.486
3	Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi lebih tinggi	129.634.397.251	114.931.035.363
	a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	6.789.485.049	7.337.748.719
	b. Dana Rutin Daerah	103.408.482.405	91.573.840.394
	c. Dana Pembangunan Daerah	19.436.429.797	16.019.446.250
4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	1.400.751.194
	Jumlah Penerimaan	140.969.155.000	126.579.028.742

Sumber : DIPENDA Kabupaten Klaten, Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1999/2000–2000/2001

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah masing-masing guna peningkatan pendapatan asli daerah agar pembangunan daerah tetap berjalan.

Bertitik tolak dari berbagai hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Periode Tahun 1990/1991 – 2000 2001*".

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh variabel investasi, jumlah penduduk, pendapatan per kapita masyarakat terhadap besarnya PAD Kabupaten Klaten ?
2. Apakah variabel yang paling dominan mempengaruhi PAD Kabupaten Klaten ?
3. Bagaimanakah trend perkembangan investasi, jumlah penduduk, pendapatan per kapita masyarakat terhadap PAD Kabupaten Klaten tahun 2010 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh investasi, jumlah penduduk, pendapatan per kapita masyarakat terhadap besarnya PAD Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi PAD Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui trend perkembangan investasi, jumlah penduduk, pendapatan per kapita masyarakat terhadap PAD Kabupaten Klaten tahun 2010.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Klaten.

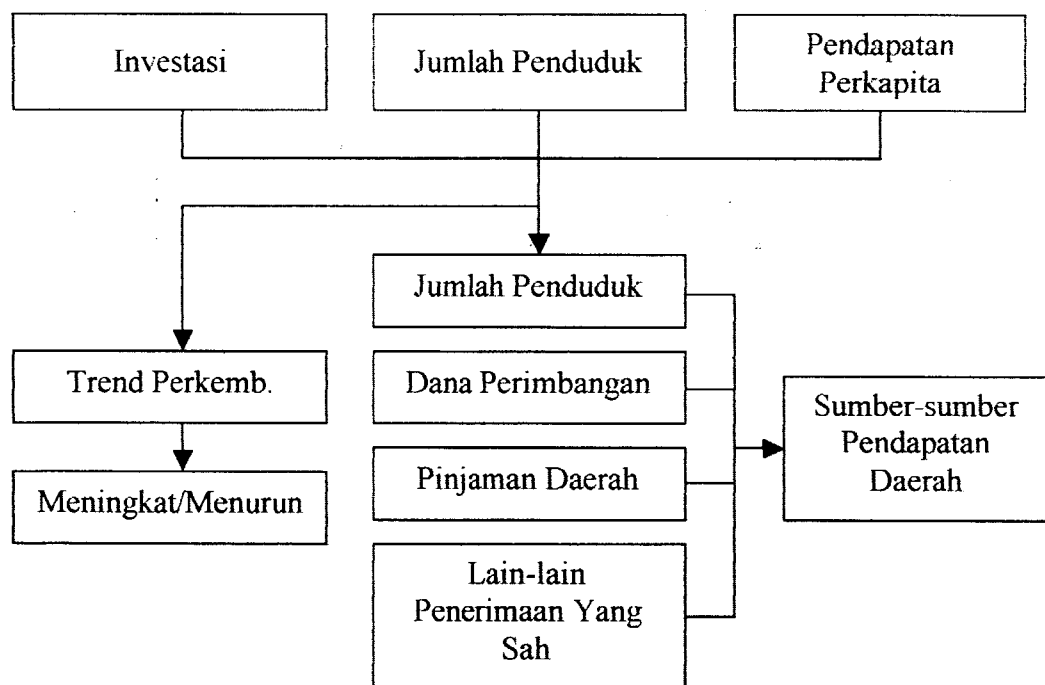
##### 2. Bagi Pemerintah Daerah Klaten

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagaimana pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan PAD.

##### 3. Bagi Pihak Lain

Merupakan tambahan informasi khususnya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

#### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu pendapatan daerah diharapkan dapat ditingkatkan penerimaannya. Dalam penelitian ini PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti besarnya investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita.

Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat yang merupakan satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan investasi yang tinggi maka pembangunan ekonomi juga akan tinggi yang selanjutnya akan diikuti oleh meningkatnya penerimaan pemerintah daerah.

Peningkatan permintaan dan penawaran barang dan jasa tidak terlepas dari meningkatnya jumlah penduduk dengan syarat penduduk tersebut yang mempunyai kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi dari masyarakat pengguna jasa.

Semakin besar pendapatan per kapita berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi, yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat yang berujung pada peningkatan permintaan masyarakat. Termasuk di dalamnya konsumsi

terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan berpengaruh pula pada kemampuan dalam membayar pajak.

Pengaruh dari investasi, jumlah penduduk, pendapatan per kapita masyarakat terhadap PAD kemudian diproyeksikan untuk mengetahui pengaruh di masa yang akan datang apakah meningkat atau menurun.

#### **F. Hipotesis**

1. a. Diduga besarnya investasi berpengaruh signifikan positif terhadap besarnya PAD Kabupaten Klaten.
- b. Diduga besarnya jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap besarnya PAD Kabupaten Klaten.
- c. Diduga besarnya pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap besarnya PAD Kabupaten Klaten.
2. Diduga besarnya investasi, jumlah penduduk, pendapatan per kapitas masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap besarnya PAD Kabupaten Klaten.
3. Diduga jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap PAD Kabupaten Klaten.
4. Trend perkembangan investasi, jumlah penduduk, pendapatan per kapita masyarakat terhadap PAD Kabupaten Klaten tahun 2010 meningkat.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah Kabupaten Klaten dengan kurun waktu tahun 1990 – 2000.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan berupa data sekunder, yang akan diperoleh melalui instansi terkait yaitu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Klaten, serta dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian.

### **3. Definisi Operasional Variabel**

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU No. 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan dalam rupiah.

#### **b. Investasi**

Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan pembeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian yang dinyatakan dalam rupiah.

c. Jumlah Penduduk

Merupakan keseluruhan penduduk Kabupaten Klaten yang tercatat pada akhir tahun yang dinyatakan dalam jiwa.

d. Pendapatan Per kapita

Adalah tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Klaten pada tahun tertentu yang dinyatakan dalam rupiah.

#### 4. Teknik Analisis Data

##### **Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua**

Digunakan data time series dari tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 2000/2001. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda mekanis dengan variabel dependen PAD dan variabel independen investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita, rumus yang digunakan (Djarwanto Ps., 1996 : 309):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (dalam rupiah)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Term

X<sub>1</sub> = Investasi (dalam juta rupiah)

X<sub>2</sub> = Jumlah penduduk (dalam jiwa)

X<sub>3</sub> = Pendapatan Per kapita (dalam juta rupiah)

### a. Uji Statistik

- Uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi)

Uji ini untuk menghitung seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen.  $R^2$  yang digunakan adalah  $R^2$  yang telah memperhitungkan jumlah variabel bebas dalam suatu model regresi atau disebut  $R$  yang telah disesuaikan (*adjusted R*).

$R$  diperoleh dengan rumus (Modul Lab. EP, 2000 : 20) :

$$R^2 = 1 - \frac{(1 - R^2)(N - 1)}{(N - k)}$$

Keterangan :

N : Jumlah sampel

K : Banyaknya parameter/koeffisien plus konstanta

- Uji t

Merupakan pengujian variabel penjelas secara individu yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujian hipotesis :

1)  $H_0 : \alpha_1 \leq 0$

$H_a : \alpha_1 > 0$

t tabel  $\rightarrow t^\alpha : N - K$

Keterangan :

$\alpha$  : derajat signifikansi

$N$  : jumlah sampel

$K$  : banyaknya parameter/koeffisien plus konstanta

- 2) Menentukan  $t_{hit}$  dengan rumus (Damodar Gujarati dan Sumarno Zein, 1995 : 78) :

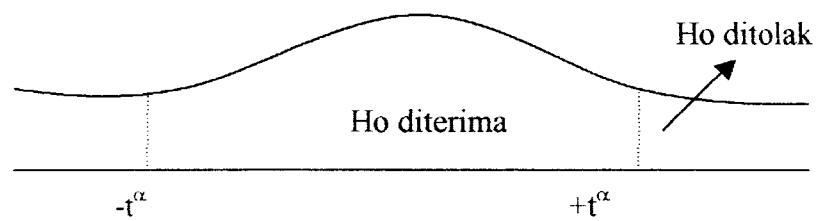
$$t_{hit} = \frac{\beta_{jk}}{S_e(\beta_j)}$$

Keterangan :

$\beta_j$  : Koeffisien regresi

$S_e$  : Standar error koeffisien regresi

- 3) Kriteria pengujian



$-t_{tab} < t_{hit} < +t_{tab}$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini dapat dikatakan variabel independen secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

$t_{hit} > -t_{tab}$  atau  $t_{hit} > +t_{tab}$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hal ini dapat dikatakan variabel independen secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

- Uji F (Uji keseluruhan Koeffisien Regresi)

Merupakan pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan serentak yang dilakukan untuk melihat apakah

variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah :

$$1) H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

$$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$$

$F_{hit}$  dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut

(Damodar Gujarati dan Sumarno Zein, 1995 : 81) :

$$F_{hit} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R)^2 / (n - k)}$$

Kriteria pengujian adalah :

- a) Apabila nilai  $F_{hit} < F_{tab}$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang serentak dari semua variabel independen terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.
- b) Apabila nilai  $F_{hit} > F_{tab}$ , maka  $H_a$  diterima yang berarti bahwa semua variabel independen secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.

## b. Uji Ekonometrika

- Multikolinieritas

Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan uji Farrar – Glauber, yaitu dengan :

1) Meregres setiap variabel bebas atas variabel bebas yang lain.  
Dari regresi tersebut diperoleh  $R^2$  yang cocok.

2) Menghitung F kritis ( $F_i$ ) dengan menggunakan rumus (Modul Lab. EP, 2000, hal. 16) :

$$F_i = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R)^2 / (n - k)}$$

Hasil  $F_i$  dibandingkan dengan  $F_{\text{tab}}$ . Jika  $F_{\text{tab}} > F_i$ , maka variabel bebas tersebut kolinear terhadap variabel lainnya. Sebaliknya jika  $F_{\text{tab}} < F_i$  maka variabel bebas tidak kolinear terhadap variabel bebas.

- Heteroskedastisitas

Terjadi apabila gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga OLS tidak efisien baik dalam sampel besar maupun sampel kecil.

Salah satu cara mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji Park yaitu :

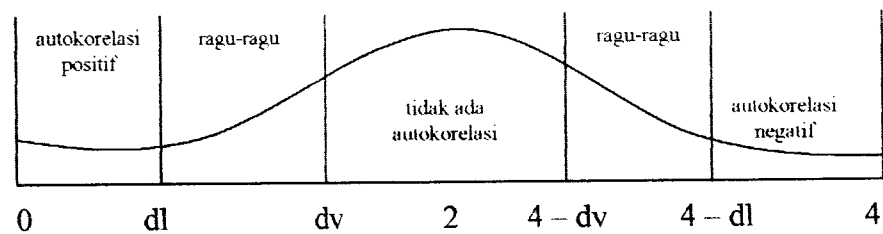
- 1) Dari hasil regresi 2SLS akan diperoleh nilai residualnya.
- 2) Nilai residual tadi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel bebas.

Hasil regresi tahap 2 dilakukan uji t. Jika signifikan maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak signifikan, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut.



- Autokorelasi

Adalah adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksiran tidak lagi efisien dalam sampel besar maupun sampel kecil. Salah satu cara menguji autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin – Watson) (Modul Lab. EP, 2000 : 17)



Gambar 1.2. Percobaan d (Durbin – Watson)

Hipotesisnya,  $H_0$  adalah dua ujungnya tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif maka :

$d < d_l$	menolak $H_0$
$d > 4 - d_l$	menolak $H_0$
$d_v < d < 4 - d_v$	menerima $H_0$
$d_l \leq d \leq d_v$ atau $4 - d_v \leq d \leq 4 - d_l$	pengujian tidak meyakinkan

**Untuk menguji hipotesis ketiga**

Untuk mendeskripsikan perkembangan PAD digunakan alat analisis trend dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (dalam rupiah)

a : Konstanta

b : Besar perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap perubahan satu unit variabel X

X : Tahun

Untuk mencari koefisien a dan b digunakan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{N}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Penggunaan model trend linear dengan metode least square ini bertujuan untuk melihat perkembangan trend hubungan variabel X dan Y selama periode penelitian maupun prospek di masa mendatang. Dimana keadaan tersebut tergantung kepada :

- Bila  $b < 0$ , maka perkembangan trend hubungan X dan Y adalah menurun.
- Bila  $b > 0$ , maka perkembangan trend hubungan X dan Y adalah meningkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembangunan Daerah**

##### **1. Pengertian Pembangunan Daerah**

Pengertian Pembangunan Daerah yaitu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada (sumber daya ekonomi dan non ekonomi) dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dari wilayah bersangkutan. Melalui pola kemitraan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi-potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian di daerahnya (Lincolin Arsyad, 1990 : 108).

##### **2. Corak Pembangunan Daerah**

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula, peniruan mentah-mentah pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan

tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentu perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Lincoln Arsyad, 1999 : 109).

Menurut UU No. 22 tahun 1999 penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan atas 3 asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Yang dimaksud asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang telah diserahkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa dan kehendak sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut lembaga perencanaan adalah perangkat daerah itu sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Pengertian Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah, menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah kepada pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan maupun pengawasannya. Untuk pelaksanaan dalam hal ini adalah instansi-instansi vertikal yang dikoordinir oleh pemerintah kepada daerah, akan tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat di daerah memunculkan pemerintah daerah yang bersifat administratif wilayah. Administratif itu sendiri adalah wilayah kerja gubernur selaku wakil pemerintah atau lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan secara umum di daerah.

### c. Tugas Pembantuan

Pengertian dari tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta pemerintah daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Ada beberapa urusan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Namun karena terbatasnya kemampuan masih menjadi tanggung jawabnya itu berdasarkan asas dekonsentrasi, maka tugas tersebut menjadi terasa berat.

## B. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti aturan. Dari aspek etimologi, otonomi daerah sebagai *zelfwergwing* atau perundingan sendiri. Dalam penjelasan lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perkembangan sejarah di Indonesia otonomi itu selain mengandung arti “perundangan” juga mengandung arti pemerintahan.

Dalam UU No. 22 tahun 1999, pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah di masa lampau dengan menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, dengan penekanan pada otonomi yang lebih mengutamakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pengertian otonomi daerah yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

#### **1. Menurut UU No. 5 tahun 1974**

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Josef Riwu Kaho, 1988 : 124).

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamuji menegaskan :

“Pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.”

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat didasari oleh pemerintah. Sesuai dengan Penjelasan Umum UU No. 5 tahun 1974 sebagai berikut :



“Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Josef Riwo Kaho, 1988 : 126).

Menurut UU No. 5 tahun 1974 Sumber-sumber pendapatan daerah (Josef Riwo Kaho, 1988 : 127) adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), yang terdiri dari
  1. Hasil Pajak Daerah
  2. Hasil Retribusi Daerah
  3. Hasil Perusahaan Daerah
  4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
  1. Sumbangan dari Pemerintah
  2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pendapatan daerah dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Pendapat non-asli Daerah

## **2. Menurut UU No. 25 tahun 1999**

Menurut UU No. 25 tahun 1999, pembiayaan desentralisasi dilakukan melalui kombinasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain yang syah. Pada dasarnya, daerah otonom akan menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien apabila PAD cukup tinggi, sehingga secara leluasa dan mandiri menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Secara lebih rinci, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dijelaskan lebih lanjut :

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Dalam pasal 4, UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pusat dan daerah PAD terdiri dari (J & J. Learning, 2000 : 39).

#### **a. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu unsur PAD yang mencakup pajak asli daerah dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua katagori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara, yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah adalah iruan wajib

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Eugenia LM, SH, CN, 1998 : 3).

Dalam UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi, pasal 2 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa secara garis besar terdapat dua jenis pajak yaitu pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.

Yang termasuk pajak daerah tingkat I adalah :

- Pajak Kendaraan
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Sedangkan jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari :

- Pajak Hotel dan Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C
- Pajak Pemanfaatan Ari Bawah Tanah dan Air Permukaan

Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan di atas yang memenuhi kriteria, sebagai berikut (Eugenia LM, SH, CN, 1998 : 7) :

- Bersifat sebagai pajak bukan retribusi

- Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- Potensinya memadai
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- Menjaga kelestarian lingkungan

Dalam pasal 3 UU No. 18 tahun 1997, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :

- Pajak Kendaraan Bermotor 5%
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10%
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%
- Pajak Hotel dan Restoran 10%
- Pajak Hiburan 35%
- Pajak Reklame 25%
- Pajak Penerangan Jalan 10%
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C 20%
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan peradapan dunia serta diiringi dengan kemajuan teknologi yang cepat maka membawa akibat tugas yang dipikul pemerintah untuk melaksanakan pembangunan semakin berat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Melihat kenyataan itu, tentu dana yang diperlukan untuk pembangunan semakin banyak dan pemerintah

mengharapkan dana yang diperoleh dari masyarakat juga meningkat. Hal ini agar pembangunan yang sedang dilaksanakan itu dapat berjalan lancar dan cita-cita masyarakat dapat terwujud.

Dengan kelonggaran itu, maka daerah bisa memungut pajak guna memperoleh dana untuk pembiayaan dalam mengurus dan mengatur anggaran rumah tangganya. Di samping itu, berarti obyek yang sudah dipungut oleh daerah tidak dapat dipungut lagi oleh pusat, dan sebaliknya. Dalam membedakan mana sebagai sumber untuk pemerintah pusat dan mana untuk daerah, didasarkan pada alasan-alasan tertentu, beberapa alasan itu antara lain :

1) Latar belakang sosial politik

Yaitu latar belakang sejarah politis kemasyarakatan, terbentuknya dan perkembangan politis suatu negara.

2) Luasnya pemasaran barang dan jasa

Jika barang dan jasa diperjualbelikan di pasar lokal saja, maka hendaknya dipungut oleh pemerintah daerah dan apabila di pasar nasional dan internasional, maka pajak dipungut oleh pemerintah pusat.

3) Manfaat barang-barang kolektif

Yaitu manfaat barang yang sifatnya kolektif dan barang-barang itu termasuk di sektor nasional dan internasional, pemungutannya lebih tepat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sebaliknya bila bersifat regional maka dikelola oleh pemerintah daerah.

4) Yuridis Teknis

Mutasi hak-hak kebendaan terhadap barang-barang tidak bergerak yang paling mengetahui adalah pemerintah daerah, maka hendaknya pajak yang dikenakan merupakan penerimaan pemerintah daerah.

5) Administrasi dan kestabilan

Jika merupakan teknis administrasi yang tinggi, sebaiknya merupakan pajak negara, tetapi pajak-pajak negara yang pendapatannya relatif stabil sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Jenis-jenis yang merupakan pungutan pemerintah adalah :

Di dalam pajak dibedakan :

- Pajak negara
- Pajak daerah

Dalam pajak daerah sendiri dibedakan :

- Pajak daerah yang berasal dari pajak negara
- Pajak daerah yang asli dari daerah sendiri
- Bea dan cukai
- Lain-lain, yaitu : retribusi, iuran dan lain-lain pungutan.

#### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari PAD, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta PP No. 20 tahun 1997.

Menurut UU tersebut, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Eugenia LM, SH, CN, 1998 : 5).

Pungutan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : tarif yang dikenakan, kualitas dan kuantitas jasa pelayanan yang diberikan dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas jasa pelayanan tersebut. Selanjutnya untuk pelaksanaan di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah. Adapun retribusi daerah dibagi menjadi tiga yaitu (Eugenia LM, SH, CN, 1998 : 5).

- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perijinan tertentu

Kemudian di dalam PP No. 20 tahun 1997, dijelaskan yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah :

- Retribusi pelayanan kesehatan

- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- Retribusi parkir
- Retribusi pasar
- Retribusi air bersih
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penggantian biaya cetak peta
- Retribusi pengujian kapal perikanan

Kemudian di dalam PP No. 20 tahun 1997 pasal 3 dijelaskan yang termasuk retribusi jasa usaha adalah (Eugenis LM, SH, SN, 1998 : 101) :

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi tempat penitipan anak
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- Retribusi penyedotan kakus
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi tempat pendaratan kapal



- Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- Retribusi penyebarangan di atas air
- Retribusi pengolahan limbah cair
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 4, dijelaskan pula yang termasuk retribusi perijinan tertentu adalah (Eugenia LM, SH, CN 1998 : 101) :

- Retribusi peruntukan penggunaan tanah
- Retribusi ijin mendirikan bangunan
- Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- Retribusi ijin gangguan

c. Bagian Laba Usaha Milik Daerah (BUMD)

Adalah penerimaan yang berupa bagian laba BUMD, yang terdiri dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Dasar hukum pembentukan BUMD, khususnya perusahaan daerah adalah UU No. 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah dan UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Tujuan pembentukan perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Bidang usah BUMD mencakup berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang

keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat. Dalam pasal 25 UU No. 25 tahun 1962 tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah yang perinciannya sebagai berikut :

1) Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan :

- Untuk pembangunan daerah sebesar 30%
- Untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25%
- Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing daerah berjumlah 45%.

2) Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu.

- Untuk dana pembangunan sebesar 8% dan untuk anggaran sebesar 7%.
- Untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.
- Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan daerah berjumlah 45%.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan lain-lain adalah bagian PAD yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain. Termasuk dalam penerimaan ini, antara lain : penerimaan sewa rumah dinas milik daerah dan hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, penerimaan cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan biaya pembinaan pengawasan tempat pelelangan ikan, penerimaan setoran cicilan utang, penerimaan setoran biaya pembinaan lembaga keuangan desa, penerimaan biaya untuk mengikuti prakualifikasi dan lain-lain .

**2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluaraannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90% dari seluruh DAU.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK ini dialokasikan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

### **3. Pinjaman Daerah**

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

### **4. Lain-lain Penerimaan Yang Sah**

Penerimaan dari sektor ini merupakan penerimaan yang bersifat tidak mengikat, seperti hibah dari pihak luar.

## **D. Peranan Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi**

### **1. Peranan modal dalam pembangunan**

Batu sendi dalam pembangunan ekonomi modern dalam fasenya yang pertama adalah pembentukan modal. Nurkse mengungkapkan, masalah ini terletak di jantung permasalahan pembangunan di negara-negara terbelakang secara ekonomis. (H.W Ardnt, 1991 : 62).

Yang dimaksud kapital atau modal adalah semua bentuk-bentuk kekayaan yang dapat memproduksi lebih lanjut, yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Sering juga dikatakan, modal/kapital adalah barang-barang yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. Kapital/modal sebagai alat pendorong pembangunan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik perbaikan dalam mutu pendidikan, kesehatan dan keahlian. Dengan demikian modal/kapital dalam rangka pembangunan tidak hanya berujud pabrik-pabrik dan perlengkapannya, namun sebenarnya juga human capital.

Kekurangan modal adalah salah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai setiap pembangunannya dan berdampak mengurangi kepesatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Perkembangan dan modernisasi suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak. Infrastruktur harus dibangun, sistem pendidikan harus dikembangkan dan kegiatan pemerintahan harus diperluas. Dan yang lebih penting lagi berbagai jenis kegiatan perusahaan dan industri modern harus dikembangkan. Ini berarti pihak pemerintah dan swasta memerlukan

modal yang banyak untuk menciptakan modernisasi di berbagai kegiatan ekonomi. (Sadono Sukirno, 1994 : 439).

Salah satu sumber yang sangat penting dalam pendanaan dan permodalan adalah pinjaman uang atau dukungan investor dari luar daerah dan bahkan dari luar negeri. Pemupukan modal melalui tabungan masyarakat di daerah belum cukup berhasil. Hal itu disebabkan karena kendala yang bersifat sosio ekonomi yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, akibatnya pemupukan modal di daerah-daerah relatif sangat terbatas dan mempengaruhi dinamika kegiatan secara keseluruhan. (Jimly Asshiddiqie, 2000 : 15).

## 2. Teori Harrod-Domar

Mengikuti kerangka pemikiran dari model pertumbuhan ekonomi harrod-Domar, di dalam suatu ekonomi tertutup (tanpa sektor luar negeri), dalam kondisi full capacity (equilibrium) dan tanpa mobilitas kapital, tabungan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang mekanismenya melalui pertumbuhan investasi (saving investment link) oleh karena itu investasi dapat dikatakan sebagai fungsi dari tabungan (Tulu T.H. Tambunan, 2001 : 33).

$$I = F(S), F'(S) > 0$$

Semakin besar dana tabungan yang dapat dihimpun oleh sektor perbankan semakin besar kemampuan negara bersangkutan untuk melakukan investasi ( $F'(S) > 0$ ). Selanjutnya peningkatan investasi menambah lebih banyak lagi kapital dan lewat proses multiplier

menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita yang lebih tinggi dengan rasio S/Y tetap tidak berubah, peningkatan pendapatan menambah kemampuan masyarakat untuk menabung dan seterusnya.

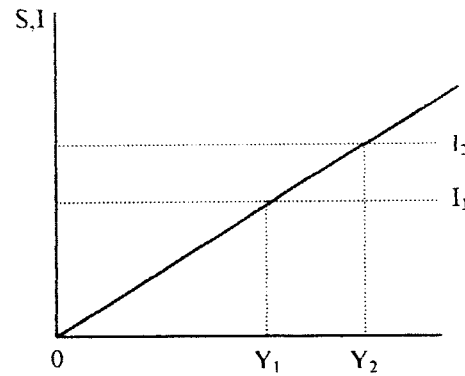
### **3. Relasi antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi**

Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat yang merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi meliputi kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, mesin-mesin dan alat produksi infrastruktur seperti : jalan raya, jembatan, gudang, pusat pembangunan listrik serta fasilitas distribusinya, alat transportasi dan komunikasi dan sebagainya. Untuk pengadaan semua itu diperlukan dana untuk membiayainya yaitu investasi.

Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya menciptakan atau meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan meningkat dan seterusnya maka terciptalah pertumbuhan ekonomi.

Seperti terlihat pada Gambar 2.1. Output ekuilibrium (dari  $Y_1$  ke  $Y_2$ ) hanya bisa naik jika permintaan naik. Dengan asumsi bahwa fungsi

konsumsi dan tabungan stabil, maka pertumbuhan output hanya bisa tercapai jika investasi meningkat ( dari  $I_1$  ke  $I_2$ ).



Gambar 2.1. Penentuan Tingkat Ekuilibrium Dari Output

Dengan Penambahan Stok Kapital (Investasi)

Terciptanya pertumbuhan ekonomi akan mendorong terjadinya pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi akan terjadi jika hanya disertai oleh pertumbuhan ekonomi.

Hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah bahwa investasi merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, dilihat dari pendapatan riil per kapita yang tinggi, penerimaan pemerintah daerah tersebut (Pendapatan Asli Daerah) juga tinggi (Tulus T.H. Tambunan, 2001 : 190).



### **E. Peranan Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi**

Teori Hansen mengenai stagnasi sekular (secular stagnation) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan/memperbesar agregatif terutama investasi. Dalam konteks pasar ia berada di sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen yang merupakan sumber permintaan akan barang dan jasa. Di sisi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen, jika ia adalah pengusaha atau tenaga kerja, jika ia semata-mata pekerja (Dumairy, 1997 : 68).

Perkemangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi penambahan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi.

Para pengikut Keynes tidak melihat tambahan penduduk sekedar sebagai tambahan penduduk saja, tetapi juga melihat adanya suatu kenaikan dalam daya beli (purchasing power). Di samping itu para pengikut Keynes juga menganggap tenaga kerja ini akan selalu mengiringi kenaikan jumlah penduduk. (Irawan Suparmoko, 1996 : 46).

Kalau seandainya terjadi penurunan dalam rangsangan untuk mengadakan investasi dan permintaan agregatif juga akan turun. Jika

perkembangan penduduk tertunda maka akumulasi kapital juga akan menjadi lesu karena beberapa alasan, yaitu wiraswasta akan mengira bahwa pasar akan menjadi sempit. Sedangkan karena tingkat keuntungan merupakan fungsi dari luasnya pasar, maka investasi yang tergantung pada tingkat keuntungan akan menjadi berbahaya dan akibatnya akan menurun. Di samping alasan itu pertambahan penduduk juga mendorong adanya perluasan investasi karena adanya kebutuhan perumahan yang semakin besar dan juga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat umum seperti jalan raya, fasilitas umum, persediaan air minum, kesehatan dan sebagainya. Kebutuhan akan kapital di bidang ini relatif lebih besar karena turunnya akumulasi kapital. (Irawan dan Suparmoko, 1996 : 47).

Berdasarkan uraian di atas pertambahan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Penerimaan pemerintah daerah dari pendapatan asli daerah akan menjadi semakin besar yaitu dari besarnya jumlah pembayar pajak dan retribusi atau masyarakat pengguna jasa dan produk lain yang disediakan oleh pemerintah daerah.

#### **F. Pendapatan Per kapita**

Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan standar hidup penduduk negara yang bersangkutan yang biasanya diukur dengan kenaikan penghasilan riil per kapita. Penghasilan riil per kapita adalah sama dengan kenaikan pendapatan nasional riil atau output secara keseluruhan yang dihasilkan selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Jadi standar hidup tidak akan dapat naikkan kecuali jika output total meningkat dengan lebih cepat dari pada pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mempengaruhi perkembangan output total diperlukan penambahan investasi yang cukup besar agar dapat menyerap pertumbuhan penduduk yang berarti naiknya pendapatan riil per kapita. (Irawan dan Suparmoko, 1996 : 43).

Penghitungan pendapatan per kapita dapat dilakukan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Menurut harga yang berlaku memberikan gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk negara itu membeli barang-barang. Selain itu juga sebagai bahan perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran di suatu negara dengan negara yang lain. Penghitungan menurut harga tetap untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Suatu masyarakat dipandang mengalami perkembangan dalam kemakmuran apabila perkembangan dalam kemakmuran apabila pendapatan per kapita menurut harga konstan terus menerus bertambah. (Sadono Sukirno, 1994 : 417).

Peningkatan pendapatan riil per kapita dan disertai perubahan serta masyarakat akan berakibat pada perubahan permintaan domestik. Perubahan permintaan domestik akan mempengaruhi perubahan struktur ekonomi seperti yang dijelaskan dengan teori engel : apabila pendapatan riil masyarakat meningkat maka pertumbuhan permintaan akan barang-barang non makanan akan lebih besar daripada pertumbuhan permintaan akan bahan makanan. Peningkatan pendapatan riil per kapita dibarengi dengan perubahan selera pembeli akan memperbesar pasar bagi barang-barang yang ada (non

makanan). Perubahan ini menggairahkan pertumbuhan industri-industri baru, di lain pihak akan meningkatkan laju pertumbuhan output industri yang sudah ada. (Tulus T.H. Tambunan, 1994 : 74).

Pembangunan ekonomi memungkinkan meningkatnya kebahagiaan masyarakat karena adanya peningkatan pendapatan. Tingkat kemakmuran atau kesejahteraan dapat dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat dan pendapatan sebagai salah satu tolok ukur dari kesanggupan pajak didefinisikan sebagai jumlah yang sanggup dikeluarkan oleh seseorang dalam setahun dan pada akhri tahun mempunyai kemakmuran yang sama seperti awal tahun.

#### **G. Hasil Penelitian Sebelumnya**

1. Studi yang dilakukan oleh Kusuma A.S Pamungkas dengan judul : *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dati II Sragen dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya tahun 1984/1985 – 1993/1994*, menyimpulkan bahwa dari hasil estimasi menunjukkan pendapatan per kapita dengan koefisien regresi sebesar 22,4823 serta nilai t hitung  $2,020 > 1,94$  dan jumlah penduduk dengan koefisien regresi sebesar 49,9844 serta nilai t hitung  $2,4902 > 1,94$  maka secara statistik kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen.
2. Studi yang dilakukan oleh Ricky Wahyu Prastowo dengan judul : *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar dan Peranannya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri tahun 1990-2000*; menyimpulkan bahwa jumlah penduduk dengan koefisien regresi sebesar 3,721 serta nilai t

hitung  $2,526 > 1,833$  dan PDRB dengan koefisien regresi sebesar  $0,699$  serta nilai  $t$  hitung  $5,183 > 1,833$  dilihat dari kedua hal tersebut maka jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Dati II Wonogiri berarti peningkatan retribusi pasar akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DAERAH DAN OBYEK PENELITIAN

### A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Klaten

#### 1. Kondisi Demografi

Perincian mengenai kepadatan penduduk per desa dan per Km<sup>2</sup> di

Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kepadatan Penduduk Per Desa dan Per m<sup>2</sup> Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2000

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jml Desa	Jumlah Penduduk	Rata-rata Penduduk Per Desa	Rata-rata Penduduk Per Km <sup>2</sup>
1.	Prambanan	24,43	16	43716	2732	1789
2.	Ganti Warno	25,64	16	39718	2482	1549
3.	Wedi	24,38	19	53362	2808	2189
4.	Bayat	39,43	18	62916	3495	1596
5.	Cawas	34,47	20	63736	3187	1849
6.	Trucuk	33,81	18	77144	4286	2282
7.	Kalikotes	12,98	7	35385	5055	2726
8.	Kebonarum	9,67	7	20968	2995	2168
9.	Jogonalan	26,70	18	56322	3129	2109
10.	Manirenggo	26,96	16	40115	2507	1488
11.	Karangnongko	26,74	14	37416	2672	1399
12.	Ngawen	16,97	13	42951	3304	2531
13.	Ceper	24,45	18	62314	3462	2549
14.	Pedan	19,17	14	47304	3379	2468
15.	Karangdowo	27,23	19	51234	2697	1763
16.	Juwiring	29,79	19	60777	3199	2040
17.	Wonosari	31,14	18	60705	3376	1961
18.	Delanggu	18,78	16	44264	2566	2357
19.	Polanharjo	23,84	18	44973	2498	1886
20.	Karanganom	24,06	19	48874	2572	2031
21.	Tulung	32,00	18	53898	2994	1684
22.	Jatinom	35,53	18	55379	3077	1559
23.	Kemalang	51,66	13	33970	2613	658
24.	Klaten Selatan	14,43	12	39049	3254	2706
25.	Klaten Tengah	8,92	9	42393	4710	4752
26.	Klaten Utara	10,38	8	38734	10467	3732
	Jumlah 2000	655,56	401	1257682	3136	1918
	1999	655,56	401	1242711	3009	1896
	1998	655,56	401	1234113	3078	1883
	1997	655,56	401	1228640	3064	1874
	1996	655,56	401	1223439	3051	1866

Sumber : BPS Kabupaten Klaten

Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Klaten mencapai 1.257.682 jiwa, dengan kepadatan rata-rata penduduk adalah 3.136 jiwa per desa dan 1.918 jiwa per Km<sup>2</sup>. Untuk kepadatan rata-rata penduduk per desa dengan jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Klaten Utara sebesar jiwa, dan yang terkecil di Kecamatan Gantiwarno sebesar 2.482 jiwa. Sedangkan untuk kepadatan rata-rata penduduk per Km<sup>2</sup> jumlah terbesar ada di Kecamatan Klaten Tengah sebesar 4.752 jiwa dan terkecil terdapat di Kecamatan Kemalang sebesar 658 jiwa.

Penduduk di Kabupaten Klaten didominasi oleh perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk perempuan yang terus meningkat dari tahun 1996-2000 dibanding laki-laki. Pada tahun 2000 jumlah penduduk perempuan 646.264 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 611.417 jiwa. Untuk jumlah penduduk perempuan terbesar ada di Kecamatan Trucuk sebesar 38.935 jiwa dan terkecil terdapat di Kecamatan Kebonarum sebesar 10.955 jiwa. Sedangkan penduduk laki-laki terbesar ada di Kecamatan Trucuk sebesar 38.209 jiwa dan terkecil di Kecamatan Kebonarum 10.013 jiwa.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2000

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Prambanan	20885	22831	43716
2.	Ganti Warno	18492	21226	39718
3.	Wedi	25705	27657	53362
4.	Bayat	30649	32267	62916
5.	Cawas	3084	32752	35836
6.	Trucuk	38209	3835	42044
7.	Kalikotes	17304	18071	35375
8.	Kebonarum	10013	10955	20968
9.	Jogonalan	27777	28545	56322
10.	Manirenggo	19148	20967	40115
11.	Karangnongko	18104	19312	37416
12.	Ngawen	21031	21920	42951
13.	Ceper	30516	31798	62314
14.	Pedan	23230	24074	47304
15.	Karangdowo	25000	26239	51239
16.	Juwiring	29528	32249	61777
17.	Wonosari	29144	32621	61765
18.	Delanggu	21848	22416	44264
19.	Polanharjo	21978	22995	44973
20.	Karanganom	23780	25094	48874
21.	Tulung	26364	27534	53898
22.	Jatinom	26826	28553	55379
23.	Kemalang	16481	17489	33970
24.	Klaten Selatan	19018	20031	39049
25.	Klaten Tengah	20551	21842	42393
26.	Klaten Utara	18842	19892	38734
	Jumlah 2000	611417	646264	1257681
	1999	603492	639219	1242711
	1998	598091	636022	1234113
	1997	594993	631264	1228640
	1996	592175	631264	1223439

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2000

Struktur penduduk di Kabupaten Klaten merupakan struktur penduduk muda, karena penduduk yang berusia 15 tahun ke bawah lebih banyak daripada penduduk yang berusia 65 ke atas. Kelompok umur terbesar ada pada usia 20-24 tahun dengan jumlah 149.790 jiwa yang terdiri dari 72.820 laki-laki dan 76.970 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Klaten Tahun 2000

Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	25313	26755	52068
5-9	28214	40392	68606
10-14	39091	40262	79353
15-19	66155	69926	136081
20-24	72820	76970	149790
25-29	63587	67212	130799
30-34	52582	55579	108161
35-39	39926	42201	82127
40-44	38152	40327	78479
45-49	39864	42136	82000
50-54	36379	38453	74832
55-59	23417	24751	48168
60-64	30694	32443	63137
65+	46223	48858	95081
Jumlah 2000	611417	646265	1257682
Jumlah 1999	603492	639219	1242711
Jumlah 1998	598091	636022	1234113
Jumlah 1997	594993	633647	1228640
Jumlah 1996	592175	631264	1223439

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2000

## 2. Ketenagakerjaan

Menurut UNICEF usia kerja adalah usia 15 tahun ke atas, namun kenyataannya di Indonesia masih relatif banyak penduduk yang usianya di bawah 15 tahun sudah bekerja. Penduduk usia kerja hasil Susenas pada tahun 1998-2000 menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,59 persen pada tahun 1999 dan tahun 2000 turun menjadi 0,47 persen. Dilihat dari jenis 0,88 persen di tahun 1999 dan naik lagi menjadi sebesar 1,39 persen pada tahun 2000. Untuk perempuan, pada tahun 1998 ke 1999 naik 3,95 persen dan tahun 1999 ke tahun 2000 turun 2,16 persen.

Tabel 3.4. Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Klaten dan Kegiatannya

Jenis Kegiatan	1998		1999		2000	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Kerja	452955	475018	448969	493796	455201	483112
Bekerja	299926	238576	292807	249262	309723	224883
Mencari Pekerjaan	14831	16244	16759	14248	15409	9553
Angkatan Kerja	314757	254820	309566	263510	325132	234436
Sekolah	102458	89128	93854	93264	93229	93586
Mengurusi RT	7331	110028	3693	110794	2167	110612
Lainnya	28409	21042	41856	26228	34673	38478
Bukan Angkatan Kerja	138198	220198	139403	230286	130069	248676

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Klaten 2000

Angkatan kerja di Kabupaten Klaten dari tahun 1998 ke tahun 1999 mengalami peningkatan 0,61 persen (dari 569 577 menjadi 573 076) sedang pada tahun 2000 justru mengalami penurunan 2,36 persen dibanding tahun 1999 (dari 573 076 menjadi 559 568). Bila dilihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan maka angkatan kerja laki-laki pada tahun 1998 sebesar 55,26 persen pada tahun 1999 sebesar 54,02 persen dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 58,10 persen, sedangkan angkatan kerja perempuan sebesar 44,74 persen di tahun 1998, pada tahun 1999 45,98 persen dan pada tahun 2000 turun menjadi 41,90 persen.

Jumlah penduduk bukan angkatan kerja dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 terus mengalami peningkatan. Dilihat dari jenis kelamin, pada laki-laki yang bukan angkatan kerja pada tahun 1998 sebesar 38,56 persen, tahun 1999 sebesar 37,71 persen, dan pada tahun 2000 turun menjadi 34,43 persen. Sedangkan pada perempuan, pada tahun 1998 sebesar 61,44 persen, tahun 1999 naik menjadi 62,29 persen dan

tahun 2000 naik lagi menjadi 65,66 persen. Turunnya angka bukan angkatan kerja pada laki-laki pada tahun 2000 diiringi dengan naiknya angka bukan angkatan kerja pada perempuan, pada tahun 2000 persentase penduduk yang bukan angkatan kerja naik diiringi dengan turunnya angka angkatan kerja.

Tabel 3.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Klaten Tahun 1998-2000

Jenis Kelamin	TPAK			TPT		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	96,49	68,95	71,43	4,71	5,41	4,74
Perempuan	53,64	53,36	48,53	6,37	5,41	4,07
L + P	61,38	60,79	59,63	5,46	5,41	4,46

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Klaten, 2000

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi produktif. Seperti yang disajikan pada tabel 3.5. diatas, TPAK di Kabupaten Klaten di tahun 2000 turun dibandingkan tahun 1999. Meskipun bila dilihat dari jenis kelamin, TPAK laki-laki meningkat dari tahun 1999 ke tahun 2000 dibanding TPAK perempuan yang dari tahun 1998 sampai 2000 cenderung mengalami penurunan.

Pada tahun 2000 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan, hal ini dapat dimengerti karena jumlah penduduk usia kerja di tahun 2000 mengalami penurunan. Penurunan TPT ini terjadi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Bagaimanapun kondisi perekonomian yang belum stabil di tahun 2000 masih terasa imbasnya ke

berbagai sektor. Kesempatan kerja yang semakin terbatas dan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan.

### 3. Perkembangan Perekonomian

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Klaten

Berbagai upaya telah dilaksanakan guna mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten pada tahun 2000 ditunjukkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 sebesar 2,51%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Agrerat di Kabupaten Klaten Tahun 1995-2000

Tahun	PDRB Atas Dasar harga Berlaku (Ribu Rp)		PDRB Atas Harga Konstan (Ribu Rp)	
		%		%
1995	1.320.531,85	11	1.177.447,97	7,4
1996	1.472.730,12	11,53	1.261.298,48	7,12
1997	170.153,70	15,44	1.295.075,63	2,68
1998	2.401.526,71	41,25	1.148.045,58	-11,35
1999	2.698.234,13	12,35	1.153.627,74	0,49
2000	2.948.815,42	9,287	1.199.551,88	3,98

Sumber : BPS, 2000

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten apabila dilihat secara sektoral dapat dilihat pada Tabel 3.7. sebagai berikut :

Tabel 3.7. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar  
 Harga Konstan 1993 di Kabupaten Klaten 1995-2000  
 (Persen)

Sektor	Tahun					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	1	3,65	0,54	-10,25	-16,47	5,74
Pertambangan dan Penggalian	12,18	22,41	9,25	-3,18	4,69	7,88
Industri Pengolahan	14,08	10,87	4,99	-10,63	6,26	5,61
Listrik, Gas dan Air	21	12,02	0,33	11,93	8,23	11,72
Bangunan/Konstruksi	17,78	3,1	3,84	-19,07	9,63	3,99
Perdagangan, Hotel dan restoran	8,02	9,85	1,16	-15,78	6,08	2,01
Pengangkutan dan Komunikasi	12,24	21,19	9,73	-4,93	6,92	1,9
Kuangan, persewaan & Jasa Persh	10,75	6,92	-0,8	-16,75	3,16	3,09
Jasa-jasa	2,28	0,28	5,57	0,69	-0,2	2,97

Sumber : BPS, 2000

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang besar adalah sektor Listrik dan air minum sebesar 11,72 persen, Penggalian sebesar 7,88 persen dan pertanian sebesar 5,74 persen. Sedangkan sektor yang pertumbuhannya relatif kecil adalah sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 1,90 persen dan jasa-jasa sebesar 2,97 persen. Secara umum, dari tahun 1995 hingga tahun 1998 pertumbuhan PDRB cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan peningkatan terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2000.

#### b. Struktur Ekonomi Kabupaten Klaten

Sedangkan kontribusi sektor ekonomi Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 3.8. sebagai berikut :

Tabel 3.8. Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995 – 2000 (Persen).

Sektor	Tahun					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	24	23,22	22,74	23,02	19,14	19,46
Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,39	0,42	0,46	0,48	0,5
Industri Pengolahan	20,04	20,74	21,21	21,38	22,61	22,97
Listrik, Gas dan Air	0,63	0,66	0,64	0,81	0,87	0,94
Bangunan/Konstruksi	8,29	7,98	8,07	7,37	8,04	8,04
Perdagangan, Hotel dan restoran	26,94	27,63	27,22	25,86	27,3	26,78
Pengangkutan dan Komunikasi	2,72	3,08	3,29	3,53	3,76	3,68
Keuangan, persewaan & Jasa Persh	5,62	5,61	5,42	5,09	5,22	5,18
Jasa-jasa	11,41	10,68	10,98	12,48	12,58	12,46
Jumlah (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, 2000

Struktur ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2000, didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 26,78%. Sektor industri sebesar 22,97% dan sektor pertanian sebesar 19,46% sedangkan sektor penggalian memberikan sumbangan terkecil sebesar 0,5% kemudian disusul listrik dan air minum sebesar 0,94%.

### c. Produk Domestik Regional Bruto Per kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita tahun 2000 menurut harga berlaku sebesar Rp 2.351.122,47 naik sebesar 7,74 persen bila dibanding terhadap tahun 1999. Sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan tahun 1993 PDRB per kapita tahun 2000 sebesar Rp 956.415,71 atau naik 2,51 persen bila dibanding tahun 1999.

Tabel 3.9. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita di Kabupaten Klaten Tahun 1995-2000

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1995	1.090.805,94	972.613,60	9,98	6,42
1996	1.206.209,65	1.033.040,87	10,58	6,21
1997	1.386.053,24	1.055.812,65	14,91	2,2
1998	1.950.313,81	932.344,05	40,71	-11,69
1999	2.182.299,30	933.040,23	11,89	0,07
2000	2.351.122,47	956.415,71	7,74	2,51

Sumber : BPS, 2000

#### d. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Pengelompokan ini didasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi masing-masing produksi. Dikelompokkan *sektor primer* apabila output masih merupakan proses tingkat dasar yang mencakup sektor Pertanian dan Penggalian. Sektor yang dikelompokkan ke dalam *sektor sekunder*, yaitu Industri Pengolahan, Listrik dan Air Minum dan Sektor Bangunan/Konstruksi. Sektor yang lain yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta jasa-jasa dikelompokkan ke dalam *sektor Tersier*.

Tabel 3.10 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kelompok Sektor di Kabupaten Klaten Tahun 2000 (Persen).

Tahun	Primer		Sekunder		Tertier	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1995	9,12	1,15	15,32	13,85	9,27	7,1
1996	10,68	3,87	11,22	8,68	12,16	7,82
1997	17,89	3,87	15,68	4,57	13,92	2,49
1998	61,75	-10,12	35,76	-12,43	33,36	-11,28
1999	6,70	-16,06	19,23	7,15	11,83	4,56
2000	3,91	5,79	11,82	5,36	11,02	2,36

Sumber : BPS, 2000

## **B. Tinjauan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat memberi gambaran tentang bagaimana kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Kita dapat mengetahui dari mana saja dan seberapa besar pendapatan daerah tersebut, juga dari mana saja dana tersebut dikeluarkan, untuk apa saja dan seberapa besar jumlahnya. Untuk dapat mengetahui berbagai hal tersebut, yang terdapat di Kabupaten Klaten, akan dijelaskan secara umum pada pembahasan berikut ini :

### **1. Penerimaan Daerah**

Sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Klaten terdiri dari berbagai pos, yaitu :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- b. Pendapatan asli daerah
- c. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
- d. Bantuan/Sumbangan
- e. Pinjaman daerah

Penerimaan daerah Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 1999/2000 penerimaan daerah sebesar Rp 12.278.070.434,58 dan terus meningkat, sehingga pada tahun 2000/2001 sudah bisa mencapai Rp 50.782.947.131, dimana hal ini merupakan kenaikan yang cukup besar. Tetapi kenaikan ini sebagian besar berasal dari bantuan/sumbangan yang merupakan kucuran dari pemerintah pusat.



Besarnya realisasi dari pos-pos penerimaan daerah yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun 1990-2000 secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11 Realisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten Klaten berdasarkan Komponen Penggunannya tahun 1989/1990-1999/2000 (rupiah)

TAHUN	JENIS PENERIMAAN				TOTAL PAD
	SLATL	PADS	BHPBP	BPP	
1989/1990	680.803.410	2.588.702.828	864.133.898	8.033.598.839	12.278.070.435
1990/1991	337.441.887	2.898.773.205	1.259.625.923	11.948.930.012	16.445.893.567
1991/1992	646.737.383	3.467.695.164	1.457.042.657	13.568.615.928	19.390.091.133
1992/1993	407.270.550	4.161.847.830	1.975.024.827	16.994.391.787	24.138.534.994
1993/1994	274.762.739	4.724.783.687	2.572.175.080	19.837.514.082	28.439.235.588
1994/1995	1.328.288.773	5.665.515.313	3.687.321.017	22.239.406.087	32.901.531.190
1995/1996	1.052.487.006	6.060.662.065	4.173.468.508	23.856.417.572	35.142.995.154
1996/1997	1.591.201.662	6.209.151.965	6.108.238.897	25.483.815.533	39.392.408.057
1997/1998	2.372.585.771	6.941.367.697	7.122.662.303	41.472.811.475	57.909.427.246
1998/1999	2.044.372.167	7.469.951.411	5.936.035.397	96.204.060.291	105.718.383.869
1999/2000	3.432.786.166	7.901.972.074	6.789.485.049	129.634.397.251	140.969.155.491
2000/2001	5.333.308.042	3.252.879.008	921.119.008	41.944.471.281	50.782.947.131

Sumber : APBD Kabupaten Klaten 1989-2000

Keterangan :

SLPTL : Sisa Lebih Perhitungan Th Lalu

BHPBP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

PADS : Pendapatan Asli Daerah Sendiri

BPP : Bantuan/Sumbangan Pemerintah Pusat

## 2. Pendapatan Asli Daerah Sendiri

Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berperan penting. Di Kabupaten Klaten ada beberapa sumber yang menjadi penopang dari PADS, yaitu :

a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang diperoleh dari pendapatan daerah itu sendiri sebagai dana untuk pembangunan daerah itu sendiri.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan hasil pembayaran pengguna fasilitas daerah tersebut untuk pembangunan fasilitas yang ada juga pemeliharannya.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah merupakan laba atau keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh daerah itu sendiri dan untuk menambah pendapatan daerah.

d. Penerimaan lain-lain

Besarnya target dan realisasi dari pos PADS di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Penerimaan dari Pos PAD di Kabupaten Klaten Tahun 1994/1995-2000/2001 (rupiah).

Tahun	Uraian	Jenis Penerimaan				Total PAD
		Pajak Daerah	Retr. Daerah	Bag. Laba BUMD	Pen. Lain-lain	
1994/1995	Target	1.250.611.000	3.008.896.000	690.675.000	506.907.000	5.457.089.000
	Realisasi	1.363.294.922	3.019.240.348	690.676.345	602.304.695	5.565.515.313
	Prosentase	109	100	1.000	119	102
1995/1996	Target	1.523.422.000	3.497.627.000	737.846.000	362.862.000	6.141.747.000
	Realisasi	1.534.509.856	3.380.840.709	728.511.333	416.760.170	6.060.622.068
	Prosentase	101	97	99	115	99
1996/1997	Target	1.671.278.000	2.939.823.000	754.261.000	409.359.000	5.774.721.000
	Realisasi	1.759.336.619	3.277.959.410	756.705.308	415.150.623	6.209.151.960
	Prosentase	105	112	100	101	108
1997/1998	Target	1.912.763.000	3.452.798.000	708.885.000	509.757.000	6.584.203.000
	Realisasi	1.759.336.619	3.700.682.675	708.885.650	533.882.532	6.941.367.697
	Prosentase	105	108	100	105	105
1998/1999	Target	2.476.811.000	3.536.807.000	615.413.000	515.592.000	7.144.623.000
	Realisasi	2.477.155.347	3.739.268.902	608.809.662	644.757.500	7.469.951.411
	Prosentase	100	106	99	125	105
1999/2000	Target	2.994.976.000	3.050.511.000	815.309.000	369.878.000	7.266.674.000
	Realisasi	3.191.855.723	3.294.346.225	880.500.000	535.270.125	7.901.972.073
	Prosentase	107	108	103	145	109
2000/2001	Target	2.424.175.000	2.401.178.000	811.000.000	265.000.000	5.901.353.000
	Realisasi	2.134.681.960	2.981.743.940	956.000.000	526.156.486	6.598.582.386
	Prosentase	88	124	118	199	112

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten 1994-2000

Dari tabel 3.12 di atas terlihat bahwa retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar dalam meningkatkan PADS di Kabupaten Klaten. Terlihat dari target dan realisasi yang dicapai pos ini rata-rata berada di atas target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 1995/1996 saja tidak memenuhi target, tapi realisasi tidak jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,66%. Hal ini membuktikan bahwa pos ini cukup untuk menopang dari PADS. Sumber yang paling banyak memberikan kontribusi kepada retribusi daerah adalah dari retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pasar.

Sedangkan pada pos pajak daerah, realisasi mengalami surplus dari yang telah ditargetkan. Surplus terbesar terjadi pada tahun 1999/2000 mencapai 106,57%. Surplus pos tersebut karena meningkatnya jumlah obyek pajak dan identifikasi pemungutan. Sumber terbesar dari pajakd daerah adalah pajak penerangan jalan. Tetapi pada tahun 2000/2001 terjadi penurunan menjadi 88,06%.

Pos bagian BUMD dilihat dari target dan realisasi yang dicapai, rata-rata berada di atas target yang diproyeksikan, hanya pada tahun 1995/1996 dan tahun 1998/1999 tidak memenuhi target. Tetapi realisasi itu tidak dari target yang diproyeksikan sebesar 98,73% pada tahun 1995/1996 dan 98,92% pada tahun 1998/1999.

Pos penerimaan lain-lain juga memberikan gambaran yang mengembirakan karena selalu berada di atas target dan jumlahnya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan, PADS Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan hasil yang dicapai dari pemungutan PADS ini memberikan sebuah harapan yang baik di masa yang akan datang karena hasil yang dicapai selalu berada di atas target. Prosentase terbesar terjadi pada tahun 1999 sedangkan prosentase terkecil terjadi pada tahun 1995/1996 yaitu sebesar 98,67%.

### **3. Pengeluaran Daerah**

Pengeluaran daerah sebagai bentuk dari alokasi penggunaan dana yang telah diterima, mencerminkan seberapa besar kegiatan yang telah

dilakukan daerah yang bersangkutan dalam menjalankan roda pembangunan. Untuk pengeluaran daerah menyangkut dua hal, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan namun dalam pembahasan di sini hanya menyangkut pembiayaan untuk pengeluaran pembangunan saja.

Besarnya realisasi alokasi pengeluaran daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Anggaran Belanja Daerah kabupaten Klaten tahun Anggaran 1990/1991-2000/2001 (rupiah)

Tahun	Jenis Pengeluaran		Total Pengeluaran
	Pengeluaran rutin	Pengeluaran pembangunan	
1990/1991	7.103.505.000	8.695.651.000	15.799.156.000
1991/1992	8.454.894.000	10.527.927.000	18.982.821.000
1992/1993	10.701.834.000	13.206.164.000	23.907.998.000
1993/1994	12.931.434.000	14.186.440.000	27.117.874.000
1994/1995	14.320.173.000	17.537.870.000	31.858.043.000
1995/1996	17.239.160.000	16.312.633.000	33.551.793.000
1996/1995	18.431.261.000	18.588.561.000	37.019.822.000
1997/1998	35.605.563.000	20.264.486.000	55.870.049.000
1998/1999	87.166.281.000	15.169.317.000	102.335.598.000

Sumber : APBD Kabupaten Klaten, 1989-2000

Dari tabel 3.13 di atas kita dapat melihat bahwa realisasi pengeluaran daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 1990/1991 pengeluaran mencapai Rp 15.799.156.000. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Klaten. Tetapi peningkatan pengeluaran terbesar terjadi pada pengeluaran rutin, sedangkan pengeluaran pembangunan peningkatannya belum begitu berarti dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran rutin. Peningkatan yang cukup besar pada pengeluaran rutin ini dikarenakan pada tahun

anggaran 1997/1998 dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sehingga berdampak pada rata-rata pengeluaran belanja pegawai yang membengkak.

Sedangkan pengeluaran pembangunan jumlahnya masih di bawah angka Rp 20 milyar, dimana pada tahun 1990/1991 pengeluaran pembangunan sebesar Rp 8.695.651.000, kemudian terus meningkat sehingga pada tahun 1997/1998 sudah mencapai Rp 20.264.486.000. Namun pada tahun anggaran 1998/1999 pengeluaran pembangunan ini kembali mengalami penurunan dengan jumlah Rp 15.169.317.000.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Deskripsi Variabel

Sebelum dilakukan analisa data terlebih dahulu dilakukan deskripsi dari masing-masing variabel yang diambil.

##### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri dengan memberdayakan potensi daerah yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.1 Realisasi penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1990/1991-2000/2001

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba BUMD	Penerimaan dari Dinas	Penerimaan Lain-lain	Total PAD
1990/1991	812.178.902	1.326.325.694.85	622.581.251	100.125	137.587.232,06	2.898.773.204,91
1991/1992	927.086.080,28	1.538.906.013,43	492.832.181,95	6.671.612	502.199.276,79	3.467.695.164,45
1992/1993	962.512.387,61	1.707.854.249,37	596.722.253,99	31.391.681	856.337.275,81	4.151.847.829,78
1993/1994	1.087.591.332	2.426.404.954	634.276.438	50.732.100	525.778.858	4.724.783.513,08
1994/1995	1.353.294.922	2.678.393.058	698.675.348	58.434.350	884.717.635,42	5.665.515.513,08
1995/1996	1.534.509.856	2.514.742.349	728.511.333	62.851.600	1.220.006.930,74	6.060.622.068,74
1996/1997	1.759.336.619	2.974.712.670	756.705.308	57.861.300	660.536.068	6.209.151.965
1997/1998	1.828.618.347	3.043.363.000	700.681.000	45.400.000	651.050.000	6.941.367.027
1998/1999	2.477.115.347	3.739.268.902	608.809.662	-	644.757.500	7.469.951.411
1999/2000	3.191.855.723	3.294.436.225	880.500.000	-	535.270.125,75	7.901.972.074
2000/2001	2.134.681.960	2.981.743.940	956.000.000	-	526.156.486	6.598.253.386

Sumber : DIPENDA Kabupaten Klaten Tahun 1990-2001.

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan retribusi daerah selalu lebih besar daripada kontribusi penerimaan yang lain terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten.

Tahun anggaran 1990/1991-1997/1998 penerimaan PAD berasal dari lima pos penerimaan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas dan penerimaan lain-lain. Tahun anggaran 1998/1999-2000/2001 terjadi perampingan yaitu pada pos penerimaan dari dinas tidak diberlakukan lagi. Pada tahun 2000/2001 penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain mengalami penurunan tetapi bagian laba BUMD mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun anggaran 1999/2000.

## **2. Investasi**

Investasi merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah memerlukan modal yang besar untuk proses pembangunan ekonomi, modal tersebut dapat dipenuhi dengan investasi yang masuk daerah tersebut.

Investasi di Kabupaten Klaten tahun 1990 sebesar Rp 186.995 juta, kemudian pada tahun 1991 mengalami penurunan dan pada 1992 mengalami kenaikan yang pesat yaitu sebesar Rp 329.171 juta. Pada tahun 1993-1996 investasi mengalami penurunan dibanding tahun 1993. Kemudian pada tahun 1997 kembali naik yaitu sebesar Rp 315.993 juta. Pada tahun 2000 investasi Kabupaten Klaten mengalami penurunan menjadi Rp 205.209 juta.



Tabel 4.2 Perkembangan Investasi Kabupaten Klaten Tahun 1990-2000

Tahun	Investasi (juta rupiah)
1990	186.995
1991	168.946
1992	329.171
1993	116.226
1994	139.935
1995	157.912
1996	216.635
1997	315.995
1998	217.147
1999	162.893
2000	205.209

Sumber : Statistik Ekonomi Jawa Tengah 2000

### 3. Jumlah Penduduk

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 1990-2000

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	Persentase
1990	1.179.047	6.071	0,52
1991	1.184.619	5.572	0,47
1992	1.189.964	5.345	0,45
1993	1.196.501	6.537	0,55
1994	1.202.742	6.241	0,52
1995	1.216.009	13.267	1,10
1996	1.223.439	7.430	0,61
1997	1.228.640	5.201	0,043
1998	1.234.113	5.473	0,44
1999	1.242.711	8.598	0,70
2000	1.257.682	14.971	1,20

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2000

Jumlah penduduk adalah keseluruhan penduduk Kabupaten Klaten yang tercatat pada akhir tahun. Penduduk Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Klaten sebesar 1.179.047 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar

6.071 jiwa dan persentase sebesar 0,52%. Pada tahun 2000 sebesar 1.257.682 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 14.971 jiwa dan persentase sebesar 1,20%. Pada tahun ini laju pertumbuhan penduduk Klaten yang paling besar dibanding pada tahun-tahun sebelumnya.

#### 4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Klaten pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita Kabupaten Klaten dari tahun 1990 sampai tahun 1997 terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut pada tahun 1998 yaitu sebesar Rp 1.055.812,65 dengan pertumbuhan sebesar 2,20%. Pada tahun 1998 pendapatan per kapita mengalami penurunan sangat drastis sebesar Rp 932.344,05 dengan pertumbuhan sebesar -11,69%. Penurunan tersebut disebabkan krisis ekonomi, sehingga perekonomian tidak lancar. Kemudian pada tahun 2000 pendapatan per kapita mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 956.415,71 dengan pertumbuhan sebesar 2,51%.

Tabel 4.4 Perkembangan Pendapatan Per kapita kabupaten Klaten Tahun 1990-2000

Tahun	Pendapatan Per kapita (rupiah)	Pertumbuhan (%)
1990	293.634,57	-
1991	312.540,94	6,44
1992	329.116,54	5,30
1993	866.478,81	61,25
1994	913.951,90	5,48
1995	972.613,60	6,42
1996	1.032.930,64	6,21
1997	1.055.812,71	2,20
1998	932.34,06	-11,69
1999	933.040,23	0,07
2000	956.415,71	2,51

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2000

## B. Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dilakukan analisis dari data yang telah diperoleh yaitu data time series dari tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 2000/2001. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel independen investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita, dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah (rupiah)

A : Konstanta

b : Koefisien Regresi

e : *error*

X<sub>1</sub> : investasi (jutaan rupiah)

X<sub>2</sub> : Jumlah penduduk (jiwa)

X<sub>3</sub> : Pendapatan per kapita (jutaan rupiah)

Berdasarkan pada data yang diperoleh, kemudian dilakukan perhitungan atau pengolahan data dengan menggunakan program E-views.

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Pengolahan Data Dengan Variabel Terikat PAD

Coefficients <sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.20E+11	3.034E+10		-3.963	.001
	Investasi	289.854	6303.949	.007	.046	.964
	Jumlah Penduduk	105795.554	26926.262	1.111	3.929	.002
	Pendapatan per Kapita	-2401.601	2598.018	-.231	-.924	.371

<sup>a</sup>. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS for windows versi 10.

Untuk mengetahui adanya kesesuaian tanda parameter estimasi dengan teori yang menerangkan, hasil estimasi fungsi di atas perlu diuji dengan uji statistik dan uji asumsi klasik.

### 1. Uji Statistik

#### a. Uji t

Merupakan pengujian variabel penjelas secara individu yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen yaitu investasi, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapitas secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis :

- $H_0 : \alpha_i \leq 0$ , artinya independen variabel tidak memiliki hubungan signifikan positif terhadap dependen variabel.
- $H_a : \alpha_i > 0$ , artinya independen variabel memiliki hubungan signifikan positif terhadap dependen variabel.

•  $t \text{ tabel} \rightarrow t^\alpha : \alpha f(n - k), i = 1, 2 \text{ dan } 3$

T tabel :  $n-1$ ;  $18 - 1$

Sehingga besarnya  $t_{\text{tabel}}$  adalah 1,740



Dengan membandingkan antara  $t_{\text{tabel}}$  dengan  $t_{\text{hitung}}$  tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

- Investasi =  $t_{\text{hitung}} = 0,046$  atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Kesimpulannya, secara statistik faktor investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif secara individual terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Jumlah Penduduk =  $t_{\text{hitung}} = 3,929$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulannya, secara statistik faktor jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan positif secara individual terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan per kapita =  $t_{\text{hitung}} = -0,924$  atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Kesimpulannya, secara statistik faktor pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif secara individual terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini dapat dikatakan jumlah penduduk ( $X_2$ ) secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan positif secara individual terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

b. Uji F (Uji Keseluruhan Koefisien Regresi)

Merupakan pengujian variabel-variabel investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita secara keseluruhan dan serentak. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita secara keseluruhan mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah :

- Hipotesa  $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

$$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$$

- $F_{tab} = F_{0,05; 18 - 3; 3-1} = 3,68$
- Sedangkan nilai  $F_{hit}$  atau  $F_{stat}$  adalah 23,866

Dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , maka dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor investasi, jumlah penduduk serta pendapatan per kapita secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap PAD.

Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) menjelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor investasi, jumlah penduduk serta pendapatan per kapita secara bersama-sama terhadap PAD adalah signifikan.

c. Koefisien  $R^2$  (Koefisien Determinasi)

Koefisien  $R^2$  atau disebut sebagai koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita.  $R^2$  yang digunakan adalah  $R^2$  yang telah memperhitungkan jumlah variabel bebas dalam suatu model regresi atau disebut  $R$  yang telah disesuaikan (*adjusted R*).

Dari hasil pengujian diketahui nilai  $R^2$  sebesar 0,836, artinya faktor investasi, jumlah penduduk serta pendapatan per kapita secara bersama-sama dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap PAD sebesar 83,6%, sedangkan sisanya sebesar 16,4% dijelaskan oleh faktor-faktor selain investasi, jumlah penduduk serta pendapatan per kapita. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa faktor investasi, jumlah penduduk serta pendapatan per kapita secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh yang cukup dominan terhadap perkembangan nilai PAD.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Ada hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi.

## Correlations

		Investasi	Jumlah Penduduk	Pendapatan per Kapita
Investasi	Pearson Correlation	1.000	.609**	.443
	Sig. (2-tailed)		.007	.066
	N	18	18	18
Jumlah Penduduk	Pearson Correlation	.609**	1.000	.893**
	Sig. (2-tailed)	.007		.000
	N	18	18	18
Pendapatan per Kapita	Pearson Correlation	.443	.893**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.066	.000	
	N	18	18	18

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menguji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Suatu kelompok data dikatakan bebas dari multikolinearitas jika di antara variabel independennya memiliki nilai korelasi  $< 0,9$ . Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai korelasi antara faktor investasi dengan jumlah penduduk sebesar 0,609 dan dengan pendapatan per kapita sebesar 0,443. Untuk faktor jumlah penduduk diketahui nilai korelasinya dengan investasi sebesar 0,609 dan dengan pendapatan per kapita sebesar 0,893. Karena nilai korelasi di antara variabel tersebut  $< 0,9$  maka dapat disimpulkan bahwa di antara variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

b. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan dalam fungsi regresi mempunyai varian yang tidak sam sehingga penaksiran OLS tidak efisien baik dalam sampel besar maupun sampel kecil (tapi masih tetap



tidak bias dan konsisten). Salah satu cara mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan *Spearman Correlation*, sebagai berikut:

Correlations

			Investasi	Jumlah Penduduk	Pendapatan per Kapita	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Investasi	Correlation Coefficient	1.000	.575*	.595**	-.222
		Sig. (2-tailed)		.013	.009	.376
		N	18	18	18	18
	Jumlah Penduduk	Correlation Coefficient	.575*	1.000	.903**	-.139
		Sig. (2-tailed)	.013		.000	.581
		N	18	18	18	18
	Pendapatan per Kapita	Correlation Coefficient	.595**	.903**	1.000	-.129
		Sig. (2-tailed)	.009	.000		.610
		N	18	18	18	18
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.222	-.139	-.129	1.000
		Sig. (2-tailed)	.376	.581	.610	
		N	18	18	18	18

\*. Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Pengujian heterokedastisitas di atas dilakukan dengan menguji korelasi antar variabel independen dengan *unstandardized residual* menggunakan *Spearman Correlation*. Suatu kelompok data dikatakan bebas dari heterokedastisitas jika korelasi antara variabel independen dengan *unstandardized residual* memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ . Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai korelasi antara faktor investasi, jumlah penduduk serta pendapatan per kapita dengan *unstandardized residual* masing-masing sebesar 0,376, 0,581 dan 0,610. Karena nilai korelasi di antara variabel tersebut  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa di antara variabel independen tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Autokorelasi

Adalah adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksiran tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu cara menguji autokorelasi adalah dengan percobaan *d* (*Durbin Watson*).

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.915 <sup>a</sup>	.836	.801	1731719929	.836	23.866	3	14	.000	1.227

<sup>a</sup>. Predictors: (Constant), Pendapatan per Kapita, Investasi, Jumlah Penduduk

<sup>b</sup>. Dependent Variable: PAD

Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menguji korelasi di antara masing-masing data dalam satu variabel independen dengan menggunakan *Durbin Watson*. Suatu kelompok data dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai *Durbin Watson* hasil pengujian berada di antara batas atas atau *upper bound* (*du*) dan *4-du*. Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* hasil pengujian sebesar 1,227. Karena nilai *du* diketahui sebesar 1,69 dan nilai *4-du* sebesar 2,31, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin Watson* hasil pengujian berada di antara *du* dan *4-du*. Oleh sebab itu disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

### 3. Koefisien Regresi

Dari hasil pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 120.240.000.000 + 289.854 X_1 + 105.795,554 X_2 - 2.401,601 X_3$$

Nilai konstanta sebesar 120.240.000.000 menjelaskan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp 120.240.000.000, jika faktor investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita dianggap nol atau tidak ada. Koefisien regresi untuk faktor jumlah penduduk diketahui sebesar + 105.795,554. Hal ini menjelaskan bahwa faktor jumlah penduduk bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap perubahan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 105.795,554 dengan arah koefisien (+). Artinya kenaikan yang terjadi pada faktor jumlah penduduk sebesar 1 orang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai PAD sebesar Rp 105.795,554. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Klaten akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

### 4. Interpretasi Ekonomi

Dari hasil pengujian regresi linear berganda yang dilakukan untuk menguji pengaruh faktor investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat terhadap PAD Kabupaten Klaten, diperoleh kesimpulan

bahwa secara bersama-sama ketiga faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Klaten. Akan tetapi secara individual, hanya faktor jumlah penduduk yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Nilai koefisien determinasi menegaskan bahwa faktor investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat dapat menjelaskan besarnya pengaruh yang ditimbulkan terhadap PAD Kabupaten Klaten secara signifikan. Adapun penjelasan dari pengaruh faktor jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Klaten dapat diuraikan sebagai berikut:

Masalah pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten justru menunjukkan adanya pertumbuhan yang selalu positif, yang berarti jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Klaten semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berdasarkan data statistik pertumbuhan jumlah penduduk selama kurun tahun 1985 – 2000.

Secara teoritis penambahan jumlah penduduk di wilayah suatu daerah akan memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dengan meningkatnya penerimaan asli daerah melalui sektor pajak daerah serta retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PAD dari komponen pajak daerah serta retribusi daerah yang menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Di samping itu peningkatan jumlah penduduk juga dapat memicu lahirnya bisnis-bisnis baru serta pengembangan bisnis yang sudah ada melalui penyerapan tenaga kerja maupun penciptaan lapangan kerja baru.

Dalam hal ini, pemerintah daerah akan mendapatkan keuntungan dari bertambahnya jumlah unit bisnis serta pengembangan infrastruktur yang nantinya dapat menjadi lahan untuk memperoleh dana bagi pembangunan daerah.

Namun demikian, dalam penelitian ini faktor investasi dan pendapatan per kapita tidak dapat menunjukkan pengaruhnya yang signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten untuk periode 1985 - 2002. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya fenomena yang tidak sejalan antara perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten selama kurun tahun 1985 – 2002 dengan dinamika yang terjadi pada realisasi nilai investasi yang cenderung mengalami *trend* penurunan. Demikian juga halnya dengan pendapatan per kapita masyarakat yang realisasinya menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif.

Realita investasi yang cenderung mengalami penurunan menunjukkan bahwa upaya pembangunan serta pengembangan sarana/prasarana di wilayah Kabupaten Klaten ini relatif kurang dapat ditangani secara maksimal. Potensi daerah yang dimilikinya kurang mampu menarik minat investor ataupun pemerintah untuk meningkatkan akselerasi (percepatan) pembangunan di Klaten.

Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa kecenderungan nilai investasi yang semakin menurun di suatu daerah berpotensi mempengaruhi pencapaian pendapatan per kapita masyarakat. Dalam

konteks Kabupaten Klaten dapat dilihat bahwa masyarakat setempat dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan memanfaatkan potensi asli daerah serta bantuan dari pemerintah.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa faktor investasi dan pendapatan per kapita relatif kecil kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan faktor jumlah penduduk maupun faktor-faktor pendukung PAD lainnya, seperti pajak daerah dan sumbangan dari pemerintah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel investasi dan pendapatan per kapita secara individual tidak terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.
2. Variabel jumlah penduduk secara individual terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.
3. Secara bersama-sama variabel investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Model regresi linear berganda yang diperoleh dari hasil pengujian adalah

$$Y = 120.240.000.000 + 289.854 X_1 + 105.795,554 X_2 - 2.401,601 X_3$$

Nilai konstanta sebesar 120.240.000.000 menjelaskan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp 120.240.000.000, jika faktor investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita dianggap nol atau tidak ada. Koefisien regresi untuk faktor jumlah penduduk diketahui sebesar + 105.795,554 yang berarti bahwa faktor jumlah penduduk bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap perubahan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 105.795,554

dengan arah koefisien (-). Artinya kenaikan yang terjadi pada faktor jumlah penduduk sebesar 1 orang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai PAD sebesar Rp 105.795,554.

5. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

## B. Saran

1. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat setempat, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah minimum regional/ propinsi serta upaya konstruktif lainnya. Sebab kombinasi dari peningkatan jumlah pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk berpotensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pengembangan serta peningkatan kualitas sarana, prasarana serta infrastruktur dapat menarik minat masyarakat untuk menetap di suatu daerah tertentu. Selanjutnya masyarakat yang tinggal tersebut akan dapat menjalankan aktivitas sosial ekonominya di wilayah daerah tersebut dan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Kountsyannis, *Modern Macro Economic*, Macmillan Press Ltd, London, 1995.
- Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro*, Jilid I, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Boediono, Seri Siosis, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.1*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta, 1995.
- Dergibson Siagian dan Sugiarto. 2000, *Statistik untuk Bisnis*, BPFE, Yogyakarta.
- Domodar Gujarati (Terjemahan), *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Endang Sih Prapti, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Diklat Kuliah.
- Farid Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika, Ekonomikamikro*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 1991.
- Imam Ghozali, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progran SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- J. Suprpto, *Ekonometrika*, LP2ES, Jakarta, 1983.
- Lincolyn Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Edisi ke-2, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Lincolyn Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-2, STIE YKPN, Yogyakarta, 1992.
- Sardono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Bina Grafika, Jakarta, 1985.
- Sritua Arief, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, UI Pers, 1993.
- Suparmoko, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta, 1991.
- Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1996.

# LAMPIRAN

**DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJIAN REGRESI LINEAR BERGANDA  
DENGAN PROGRAM SPSS FOR WINDOWS VERSI 10**

Tahun	PAD	Investasi	Jumlah Penduduk	Pendapatan per kapita
1985	1,201,087,798.93	12,093.12	1,142,955.01	148,787.18
1986	1,494,379,151.98	11,028.62	1,148,382.09	157,217.63
1987	1,861,674,955.85	213,649.97	1,153,587.08	166,022.64
1988	2,159,704,068.96	129,727.54	1,159,959.25	262,386.15
1989	2,696,616,085.41	162,972.35	1,166,041.37	277,595.18
1990	2,898,773,204.91	186,995.00	1,179,047.00	296,634.57
1991	3,467,695,164.45	168,946.00	1,184,619.00	312,540.94
1992	4,151,847,829.78	329,171.00	1,189,964.00	329,116.54
1993	4,724,783,513.08	116,226.00	1,196,501.00	866,478.81
1994	5,665,515,513.08	139,935.00	1,202,742.00	913,951.90
1995	6,060,622,068.74	157,912.00	1,216,009.00	972,613.60
1996	6,209,151,965.00	216,635.00	1,223,439.00	1,032,930.64
1997	6,941,367,697.00	315,995.00	1,228,640.00	1,055,812.71
1998	7,469,951,411.00	217,147.00	1,234,113.00	932,340.60
1999	7,901,972,074.00	162,893.00	1,242,711.00	933,040.23
2000	6,598,253,386.00	205,209.00	1,257,682.00	956,415.71
2001	12,883,731,673.00	248,517.76	1,261,950.00	988,745.00
2002	15,911,437,259.00	300,077.18	1,271,375.73	996,130.11

**Keterangan:**

- \* PAD dalam Rupiah
- \* Investasi dalam ribuan Rupiah
- \* Jumlah Penduduk dalam orang
- \* Pendapatan perkapita/bulan dalam Rupiah

# Regression

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendapatan per Kapita, Investasi, Jumlah Penduduk <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 <sup>a</sup>	.836	.801	1731719929.0

Model Summary<sup>b</sup>

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.836	23.866	3	14	.000	1.227

a. Predictors: (Constant), Pendapatan per Kapita, Investasi, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.1471306E+20	3	7.15710E+19	23.866	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.1983955E+19	14	2.99885E+18		
	Total	2.5669702E+20	17			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan per Kapita, Investasi, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.2024E+11	30341096067		-3.963	.001
	Investasi	289.854	6303.949	.007	.046	.964
	Jumlah Penduduk	105795.554	26926.262	1.111	3.929	.002
	Pendapatan per Kapita	-2401.601	2598.018	-.231	-.924	.371

a. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	326693632.0	11961529344	5572142490	3553896470.09	18
Residual	-3982419968	3949908224	1.929E-05	1571510228.56	18
Std. Predicted Value	-1.476	1.798	.000	1.000	18
Std. Residual	-2.300	2.281	.000	.907	18

a. Dependent Variable: PAD